

1.500 Orang Telah Donasikan Plasma Konvalesen di Jakarta

JAKARTA (IM) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, sebanyak 1.500 orang telah mendonasikan plasma konvalesen di PMI (Palang Merah Indonesia) DKI Jakarta. Dia juga berencana untuk mendonasikan plasma konvalesen. Riza Patria pernah terinfeksi Covid-19 pada akhir tahun lalu.

"Beberapa hari ke depan akan melakukan donor plasma," kata Riza melalui keterangan tertulis, Selasa (2/2).

Dia pun mengimbau agar masyarakat turut serta mendonasikan darah. Sebab selama pandemi, jumlah donor darah di Jakarta turun drastis.

Sebelumnya, dalam sehari, PMI DKI Jakarta mencatat ada 1.000-1.500 donor darah. Namun sejak pandemi, jumlahnya berkurang hingga hanya 200 donor.

"Untuk donor plasma konvalesen, mudah-mudahan ini bisa membantu pasien Covid-19 yang membutuhkan plasma," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah mendonasikan plasma konvalesen. Anies juga pernah terinfeksi Covid-

19. Para donor di Ibu Kota akan difasilitasi, karena Unit Transfusi Darah (UTD) PMI DKI Jakarta telah menerima mandat sebagai penyedia plasma konvalesen bagi pasien Covid-19 sejak Juni 2020 lalu.

Para donor plasma konvalesen yang ingin berkontribusi dapat menghubungi PMI DKI Jakarta di (021) 3906666 serta email untuk layanan pelanggan di info@utdpmidki.jakarta.or.id. Ada beberapa kriteria khusus yang perlu diperhatikan bagi para donor plasma konvalesen, antara lain:

1. Pernah terdiagnosis konfirmasi Covid-19 (hasil swab PCR dan/atau swab antigen positif).

2. Bebas gejala Covid-19 (demam/batuk/sesak/diare) sekurang-kurangnya 14 hari.

3. Usia 18-60 tahun.

4. Disarankan laki-laki, dan wanita yang belum pernah hamil.

5. Berat badan minimal 55 kilogram.

6. Tidak memiliki penyakit yang berat (gagal ginjal, jantung, kanker, kencing manis, darah tinggi tidak terkontrol). ● **osm**

Jalan Gunung Sahari Dipasang Pompa Air untuk Antisipasi Banjir

JAKARTA (IM) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat memasang pompa air di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi banjir di kawasan tersebut.

"Pompa ini berkapasitas seribu liter per detik dan mampu menjangkau pemukiman di sekitar Jalan Gunung Sahari, serta Jalan Gunung Sahari sisi Barat dan Timur," kata Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat, Saiful, Selasa (2/2), /2021).

"Jadi cakupan area yang luas itu menjadi pertimbangan pengadaan pompa berkapasitas 1.000 liter per detik," lanjutnya.

la menambahkan, pompa air tersebut baru selesai dipasang Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Pompa air tersebut telah diuji coba. Ia memastikan, pompa air tersebut berfungsi secara baik.

"Saat ini kamu juga sedang uji coba. Hujan besar beberapa hari lalu, pompa ini langsung difungsikan. Alhamdulillah tidak ada genangan di sini," kata Saiful. ● **ber**

FOTO/RISTON LUBIS



KANOPI SOBEK-SOBEK

Atap kanopi di depan Gedung B Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini sudah sobek-sobek. Pemandangan ini membuat kompleks perkantoran tersebut tampak kumuh. Foto diambil, Selasa (2/2).

Rencananya, Hingga Maret 2021 Transjakarta Renovasi 11 Halte

JAKARTA (IM) - PT Transpota Jakarta (Transjakarta) merenovasi 11 halte di lima koridor utama untuk meningkatkan pelayanan bagi penumpang.

"Perbaikan halte ini dengan mengganti material lantai halte yang sebelumnya berbahan bordes menjadi semen fiber," ujar Direktur Operasional TransJakarta, Praselia Budi, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (2/2).

Perbaikan tersebut akan berlangsung sejak awal Februari hingga pertengahan Maret mendatang. Renovasi dilakukan secara bertahap sehingga halte-halte yang diperbaiki untuk sementara waktu ditutup dan tidak beroperasi.

"Pelanggan yang biasanya menggunakan halte-halte ini bisa menggunakan alternatif halte-halte terdekat untuk beraktivitas," imbuh Praselia.

Misalnya, pelanggan yang biasa menggunakan Halte Sumur Bor dan Halte Jembatan Baru, Jakarta Barat, bisa menggunakan layanan di Halte Pesakih, Dispenda, dan Halte Rawa Buaya sebagai halte terdekat.

Berikut daftar halte yang direnovasi beserta waktu perbaikannya:

1. Halte Kalideres (Koridor 3), waktu pengerjaan 3 Februari-28 Februari 2021.

2. Halte Sumur Nor (Koridor 3), waktu pengerjaan 1 Februari-14 Februari 2021 Halte.

3. Jembatan Baru (Koridor 3), waktu pengerjaan 1 Februari-28 Februari 2021 Halte Istiqal (Koridor 2), waktu pengerjaan 26 Januari-8 Februari 2021.

4. Halte DEPLU (Koridor 2), waktu pengerjaan 15 Februari-28 Februari 2021 Halte Gambir 1 (Koridor 2), waktu pengerjaan 15 Februari-28 Februari 2021.

5. Halte Gambir 2 (Koridor 2), waktu pengerjaan 1 Maret-14 Maret 2021 Halte Ragunan (Koridor 6), waktu pengerjaan 22 Februari-14 Maret 2021.

6. Halte Pinang Ranti (Koridor 9), waktu pengerjaan 15 Februari-14 Maret 2021 Halte Pulo Gadung (Koridor 4), waktu pengerjaan 1 Maret-14 Maret 2021 Halte RSPAD (Koridor 2), waktu pengerjaan 8 Maret-21 Maret 2021

"Transjakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Kami akan terus berupaya memberikan pelayanan maksimal yang aman dan nyaman kepada seluruh pelanggan," kata Praselia.

Informasi ini juga diunggah di akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, @dkijakarta, pada Senin (1/2). ● **osm**

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



PERKEMBANGAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA

Bidan menyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac tahap kedua kepada tenaga medis di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta, Selasa (2/2). Kementerian Kesehatan menyatakan hingga 2 Februari 2021 sebanyak 596.260 orang Sumber Daya Manusia Kesehatan telah menerima vaksinasi tahap pertama dan 51.999 orang untuk vaksinasi tahap kedua.

Pengembang Grand Kota Bintang Diduga Tak Kantongi Izin Ubah Sungai Cakung

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sudah mengancam akan membongkar bangunan Grand Kota Bintang jika pengembangnya terbukti mempersempit lebar sungai Cakung, yang sebelumnya 12 meter menjadi 6 meter.

BEKASI (IM) - Pengembang Grand Kota Bintang, Bekasi, dituding melakukan pelebaran lahan sehingga mengakibatkan ukuran sungai Cakung semakin menyempit. Perubahan ukuran sungai dari 12 meter menjadi 6 meter ini diakui Pemkot Bekasi sudah melanggar peraturan.

Menurut Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas (SDA) Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Zainal Abidin, pengembangan belum mengantongi izin dari pemerintah pusat terkait pelebaran lahan tersebut.

"Ya itu sudah disarankan dari kewajiban dia (pengembang) harus lakukan izin ke Kementerian, nah itu yang tak dilaksanakan. Kan kali Cakung

itu kewenangannya ada di Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC)," kata Zainal, Senin (2/1).

Zainal mengaku tak bisa melakukan banyak hal terkait sikap pengembangan.

"Intinya sudah disarankan izin ke kementerian tapi mungkin Kota Bintangnya seperti itu," kata Zainal.

Kini setelah pengembangan Grand Kota Bintang mendapatkan teguran keras dari pemerintah pusat, Zainal dan beberapa Dinas terkait akan memastikan pengembangan mengembalikan ukuran sungai.

"Kita upayakan sesegeranya (pengembalian ukuran sungai). Kita lagi koordinasi juga dengan Dinas - Dinas instansi terkait untuk lakukan monitor-

ing," ujar Zainal.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebelumnya mengancam akan membongkar bangunan Grand Kota Bintang jika pengembangnya melakukan pelanggaran.

"Jika pengembang melakukan kesalahan yang sama, maka Pemerintah tidak segan-segan akan membongkar bangunan mereka," ujar Basuki saat melakukan tinjauan bersama Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil, di kawasan Grand Kota Bintang, Bekasi, Rabu (27/1) lalu.

"Kalau melanggar, kami bongkar. Kalau membongkar kan rugi dua-duanya (pengembang dan masyarakat)," sambung Basuki.

Selain itu, kata dia, sanksi pembongkaran akan memberikan pembelajaran bagi para pengembang agar tidak melakukan kesalahan yang sama pada masa mendatang. Dengan adanya penertiban berupa pembongkaran bangunan dan pelebaran Sungai Cakung ini dapat memini-

malisasi tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang. Lebih dari itu, dapat mengurangi risiko bencana banjir yang terjadi di Grand Kota Bintang di Kota Bekasi.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil memastikan tidak akan mempidana pengembangan TCI Property Consultant selama bisa mengembalikan fungsi Sungai Cakung.

"Oleh sebab itu, kami tidak akan mengenakan pidana selama mereka (pengembang) kolaboratif, mengembalikan fungsi Sungai (Cakung) seperti yang ada sebelumnya," jelas Sofyan.

Dibantah

Sementara pihak PT Kota Bintang Rayartri selaku pengembang Grand Kota Bintang membantah tak mengantongi izin dari pemerintah pusat terkait masalah perubahan ukuran Sungai Cakung.

Suryadi, pihak manajemen PT Kota Bintang Rayartri mengatakan, perubahan ukuran itu sudah mendapatkan izin dari pemerintah sejak lama.

"Kan pak Wali Kota sudah bilang kita sudah lakukan itu perizinan yang diperlakukan pada saat itu," kata Suryadi saat dihubungi wartawan, Selasa, (2/2).

Suryadi pun mengatakan bahwa pihaknya tak pernah merasa melakukan penyempitan ukuran sungai Cakung. PT Kota Bintang Rayartri bahkan mengklaim pernah melebarkan ukuran kali di beberapa titik. Namun pelebaran dianggap kurang sesuai dengan ketentuan sehingga harus menunggu kajian dari pemerintah. Ketika ditanya wilayah sungai mana saja yang dilebarkan, Suryadi mengaku belum mengetahui.

"Saya juga sudah enggak hapal teknisnya itu karena itu orang Teknis," katanya.

Selain itu, Suryadi juga meluruskan bahwa penyebab banjir di underpass tol JORR Kalimalang bukan karena sempitnya ukuran sungai di kawasan Grand Kota Bekasi. Banjir yang terjadi di underpass tol JORR disebut karena wilayah yang berbentuk cekung sehingga air mengumpul ketika hujan.

"Perlu dijelaskan ini dia dua hal yang berbeda nih (underpass tol dan sungai Cakung). Kalau di media kadang-kadang dijadiin satu," katanya.

Namun demikian, pihak pengembangan tetap mengikutu arahan pemerintah Kota Bekasi untuk langkah selanjutnya. ● **osm**

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Minta 154 CPNS Berpikir out of The Box

KOTA BEKASI (IM) - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi bersama Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan, Pendidikan Daerah Kota Bekasi, Karto hadir dalam pemberian motivasi kepada 154 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Bekasi tahun 2019, yang telah diberikan Surat Keputusan pada Apel Senin (1/2) pagi.

Rahmat Effendi menjabarkan mengenai visi dan misi Kota Bekasi yang harus menjadi target dalam bekerja di lingkup Pemerintah Kota Bekasi.

Kepada CPNS, dia mengucapkan selamat bergabung dalam tatanan Pemerintahan Kota Bekasi dengan sistem kerjasama dan koordinasi yang baik untuk menciptakan kerja yang maksimal dan think out of the box.

Sebanyak 154 CPNS yang diangkat berdasarkan SK CPNS Tahun 2019 itu terbagi di dalam Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Dinas Perumahan, Pemukiman, Pertanahan Kota Bekasi.

Wali Kota menjelaskan think of the box yang dimaksudnya, PNS bekerja tidak hanya secara struktural dan selalu berpatokan pada kerangka acuan kerja, selagi bisa membantu dalam pekerjaan lain bisa terus melaksanakan, tidak hanya berpatokan kerja di lingkungannya saja.

"Tidak ada yang bilang lagi, itu menjadi tanggung jawab dinas saja, tapi semua berhak untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang intinya adalah saling berkaitan," ujar pria yang akrab disapa Pepen itu.

Kota Bekasi, lanjut Pepen, adalah kota yang pluralisme yang tidak membeda bedakan suku, budaya dan ras apalagi agama.

"Kita menjadi satu NKRI di Kota Bekasi yang akan tetap nyaman, aman, tentram," sebutnya dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Senin (1/2) malam.

"Selamat bergabung untuk para CPNS yang baru saja menerima SK. Loyalitas adalah kunci utama menjalani roda Pemerintahan Kota Bekasi. Kalian masih fresh membantu para pegawai yang sudah lama di instansi Pemerintah Kota

Bekasi," ujarnya.

Dalam era modern sekarang khususnya digitalisasi, ucap Pepen lagi, para CPNS ini pasti sangat mengerti apa saja prosedur yang dijalani lewat teknologi, beda dengan pegawai yang sudah 20 sampai 30 tahun bekerja.

"Untuk itu, saling membantu dan buat inovasi terbaru untuk bersama menyelesaikan visi misi Kota Bekasi ! Pesan saya yakni harus menjadi panger, jangan hanya menjadi pamong," katanya.

Rencananya, para CPNS ini akan di latih baris berbaris bersama Danyon 202 untuk melatih kedisiplinan dan mengingat pada masa mengenakan seragam sekolah, latihan baris berbaris. Peningkatan disiplin bagi ASN juga sangat diandalkan dalam bekerja.

Usai pemaparan, Kepala BKPPD Kota Bekasi, Karto, memperkenalkan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir dalam acara tersebut di antaranya, Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Tata Ruang dan Kepala Dispersikm Kota Bekasi. ● **mdl**

FOTO:HUMAS PEMKOT BEKASI



Sebanyak 154 CPNS Pemerintah Kota Bekasi saat menerima motivasi dari Wali Kota Bekasi di Stadion Patriot Candrabhaga, Senin (1/2).

Kasatpol PP Kota Bekasi Hibau Masyarakat untuk Patuhi Prokes

FOTO:HUMAS PEMKOT BEKASI



Abi Hurairah, Kasatpol PP Pemerintah Kota Bekasi.

KOTABEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus menjalankan tugas untuk mengingatkan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).

Anggota Satpol PP bertugas mengamankan tempat-tempat kerumunan yang bisa menjadi tempat penyebaran Covid, pada pusat pembelajaran maupun area publik lainnya.

"Untuk pengamanan dan melakukan himbauan kepada masyarakat, kami telah menyiapkan personil yang bertugas menyalurkan maupun menindak pelanggaran saat operasi prokes, guna mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan," kata Kasat Pol PP Kota Bekasi, Abi Hurairah dalam siaran pers Humas Pemkot Bekasi, Senin (1/2) malam.

Dijelaskannya, untuk personil yang diterjunkan, selain personil yang melakukan pengamanaan, ada tim yang bertugas menyalurkan protokol kesehatan, pengunjung, maupun pedagang untuk memakai masker. Pihaknya akan melakukan penyaluran rutin.

Abi melanjutkan, personil yang diturunkan dibantu oleh TNI, Polri, Dishub maupun aparat pemerintah.

"Di manapun, Satpol PP akan terus mengingatkan masyarakat bahkan menindak tegas jika mendapati pelanggaran protokol kesehatan," paparnya.

Ia lebih jauh menegaskan, bahwa di masa PPKM, kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sangatlah penting.

"Jika masyarakat tersebut disiplin, ingat dan patuh akan peraturan serta himbauan yang disampaikan, Insya Allah kita yakin masyarakat akan sehat dan jauh dari penyebaran covid ini. Karena disiplin itu dimulai dari diri sendiri," ucapnya mengakhiri. ● **mdl**